



**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH
PEMERINTAH PUSAT MENJELANG PILKADA SERENTAK
2024 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

SKRIPSI

ROKI ARNANDA SAPUTRA

1910611115

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH
PUSAT MENJELANG PILKADA SERENTAK 2024 DALAM
PERSPEKTIF DEMOKRASI**

ROKI ARNANDA SAPUTRA

1910611115

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H

NIP. 195709111983031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Roki Arnanda Saputra
 NIM/NPM : 1910611115
 Program Studi : S1 Ilmu Hukum
 Judul : Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menjelang Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Demokrasi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dian Khoreanita Pratiwi, S.H.,M.H
Ketua

Ali Imran Nasution, S.H.,M.H
Anggota 1

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H
Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqurrahman, S.H.,M.Kn
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal Ujian : 06 Januari 2023

BIODATA PENULIS

Nama : Roki Arnanda Saputra
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Lodan Raya Kampung Bandan
RT.05 RW.02 Ancol, Jakarta Utara
No. Telpon : 083898274985
Email : rokiarnanda17@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Suyatno
b. Ibu : Kamini

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Ancol 02 Petang (Lulus Tahun 2012)
2. SMP : SMP Negeri 54 Jakarta (Lulus Tahun 2016)
3. SMA : SMA Negeri 17 Jakarta (Lulus Tahun 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kepala Divisi Humas Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
2. Anggota Riset Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
3. Liaison Officer Veteran Legal Competition 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Roki Arnanda Saputra

NIM/NPM : 1910611115

Tanggal : 29 Desember 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Roki Arnanda Saputra
NIM/NPM : 1910611115
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah
Pusat Menjelang Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif
Demokrasi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan



Roki Arnanda Saputra

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Dalam mewujudkannya maka diselenggarakan pemilu sebagai bentuk proses demokrasi. Proses demokrasi juga dilakukan pada tingkat daerah yakni pilkada. Seiring perkembangannya, pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2024, namun dalam tatanan pelaksanaannya mengakibatkan kekosongan kepala daerah yang habis masa jabatannya menjelang pilkada serentak 2024. Maka ditunjuklah penjabat kepala daerah dalam mengisi kekosongan tersebut. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif, didasarkan pada penelitian pustaka. Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* serta *comparative approach*. Hasil penelitian ditemukan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah menjelang pilkada serentak 2024 tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, dengan tidak melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Penunjukan penjabat kepala daerah ini menimbulkan kemunduran demokrasi. Bahwasannya terdapat cara yang sekiranya dapat ditempuh sebagai alternatif selain penunjukan penjabat kepala daerah, seperti dengan melibatkan peran DPRD, pemilihan penjabat kepala daerah di DPRD, perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang habis menjelang pilkada serentak 2024 serta relevansi penunjukan penjabat kepala daerah ini bagi daerah otonomi baru hasil pemekaran.

Kata Kunci : Penunjukan, Penjabat Kepala Daerah, Pilkada Serentak, Demokrasi

ABSTRACT

Indonesia is a democratic legal state. In realizing this, elections are held as a form of the democratic process. The democratic process is also carried out at the regional level, namely the regional elections. Along with its development, regional elections are held simultaneously in 2024, but in the implementation order, it results in a vacancy for regional heads whose term of office expires ahead of the 2024 simultaneous regional elections. So an acting regional head is appointed to fill the void. The research method is normative juridical which is qualitative, based on literature research. Sources of data in the form of primary data, secondary and tertiary. Data analysis using the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study found that the appointment of acting regional heads ahead of the 2024 simultaneous regional elections is not following democratic principles, by not involving the people in decision-making. The appointment of the acting regional head led to a setback in democracy. That there are ways that can be taken as an alternative to the appointment of the acting regional head, such as by involving the role of the DPRD, the election of the acting regional head in the DPRD, extending the term of office of the regional head which expires ahead of the 2024 simultaneous local elections and the relevance of the appointment of the acting regional head for the new autonomous region results of the expansion.

Keywords: *Appointment, Acting Regional Head, Simultaneous Local Election, Democracy*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa adanya suatu hambatan yang berarti. Adapun pada hakikatnya penulisan tugas akhir ini dikerjakan guna memenuhi salah satu prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan penuh dalam proses pengerjaan tugas akhir ini dengan secara baik. Kemudian penulis ucapkan secara khusus rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Orang tua penulis, Bapak Suyatno dan Mama Kamini tercinta serta adik Rafa Aldiano Saputra yang telah mendukung secara penuh, memberikan semangat, memberikan nasihat, menghaturkan doa, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam proses kegiatan pengerjaan tugas akhir ini dengan tulus;
2. Bapak Dr. Anter Venus., MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn, sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, nasihat berharga, masukan serta saran yang membangun selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini;
6. Ibu Dr. Atik Winanti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memeberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, serta arahan dalam bimbingan akademik selama proses perkuliahan;

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan baik dari segi akademik, moril serta yang lainnya;
8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memberikan beasiswa berupa bantuan biaya personal pendidikan kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi melalui Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul;
9. Bapak Unan Pribadi, S.H., M.H selaku direktur pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat melaksanakan magang dan mempelajari hal-hal dalam dunia kerja yang berkaitan dengan hukum, pemerintahan dan birokrasi;
10. Para sahabat penulis dalam lingkup organisasi Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
11. Para sahabat penulis dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Raihan Wibowo, Fadriyatun, Fachri Fadhillah, Ni Wayan Widya Pratiwi, Faiz Emery Muhammad, Gilang Abi Zaifa dan sahabat penulis yang lainnya yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
12. Para sahabat penulis dan juga rekan seperbimbingan tugas akhir yakni Fachri Fadhillah, Julian Immanuel dan Bunga Deskomala yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan berbagi ilmu pengetahuan selama pengerjaan tugas akhir ini;
13. Rekan-rekan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga selama masa perkuliahan;
14. Pihak-Pihak terkait yang turut serta dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat atas amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Dengan pasti, penulis selalu menyertakan doa yang terbaik untuk kita semua.

Tentunya penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun agar tercapai sempurnanya penulisan ini. Penulis berharap dengan adanya hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pribadi maupun bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Jakarta, 2 November 2022



Roki Arnanda Saputra

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teori	14
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	34
A. Pandangan Demokrasi Terhadap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024	34
B. Perlunya Mekanisme Yang Lebih Demokratis Selain Penunjukan Penjabat Kepala Daerah	43

BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Analisis Pandangan Demokrasi Terhadap Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024.....	48
B. Analisis Diperlukannya Mekanisme Lain Yang Lebih Demokratis Selain Penunjukan Pejabat Kepala Daerah	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Antara Pilkada Langsung dengan Pilkada Tidak Langsung.....	53
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Rangka Kekosongan Kepala Daerah Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.....	60
---	----